

Pemikiran A.H. Nasution Mengenai Nilai Kepemimpinan dalam Buku Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia

Faujian Esa Gumelar¹, Leli Yulifar², Agus Mulyana³, Wawan Darmawan⁴

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

faujanesag@upi.edu

Naskah diterima tanggal 1 Juli 2025, direvisi akhir tanggal 15 Oktober 2025, disetujui tanggal 10 November 2025.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemikiran A.H. Nasution mengenai nilai-nilai kepemimpinan sebagaimana didokumentasikan dalam karyanya yang monumental "Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia". Dengan memanfaatkan kerangka analisis konten Klaus Krippendorff yang mencakup dimensi tekstual, semantik, dan pragmatis, penelitian ini mengungkap bagaimana Nasution mengonstruksi konsep kepemimpinan melalui dokumentasi autentik tentang proses pengambilan keputusan strategis selama perjuangan kemerdekaan. Temuan menunjukkan bahwa paradigma kepemimpinan Nasution menekankan empat dimensi fundamental: kepemimpinan karismatik-transformatif yang menemukan legitimasi dari kinerja historis dan kepercayaan publik, kepemimpinan adaptif-pragmatis yang menyeimbangkan idealisme dengan realitas kontekstual, kepemimpinan strategis-integratif yang mampu mengkoordinasikan berbagai front secara simultan, dan kepemimpinan reflektif-kritis yang ditandai dengan kejujuran intelektual dalam mengakui keterbatasan dan belajar dari kesalahan. Penelitian ini berkontribusi pada teori pendidikan kepemimpinan dengan menyediakan model kepemimpinan asli Indonesia yang berakar pada pengalaman historis daripada kerangka Barat yang diimpor. Pemikiran Nasution tetap sangat relevan untuk pengembangan kepemimpinan kontemporer yang menekankan kecerdasan kontekstual, integritas moral, dan kapabilitas transformatif dalam situasi krisis.

Kata Kunci: kepemimpinan, A.H. Nasution, kepemimpinan transformatif, pemikiran strategis, manajemen krisis

Abstract

This study analyzes A.H. Nasution's thoughts on leadership values as documented in his monumental work "Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia" (Around the Indonesian War of Independence). Utilizing Klaus Krippendorff's content analysis framework encompassing textual, semantic, and pragmatic dimensions, this research reveals how Nasution constructs leadership concepts through authentic documentation of strategic decision-making processes during the independence struggle. The findings indicate that Nasution's leadership paradigm emphasizes four fundamental dimensions: charismatic-transformative leadership that derives legitimacy from historical performance and public trust, adaptive-pragmatic leadership that balances idealism with contextual realities, strategic-integrative leadership capable of coordinating multiple fronts simultaneously, and reflective-critical leadership characterized by intellectual honesty in acknowledging limitations and learning from mistakes. This research contributes to leadership education theory by providing an indigenous Indonesian leadership model rooted in historical experience rather than imported Western frameworks. Nasution's thoughts remain highly relevant for contemporary leadership development that emphasizes contextual intelligence, moral integrity, and transformative capability in crisis situations.

Keywords: leadership, A.H. Nasution, transformative leadership, strategic thinking, crisis management

How to cite (APA Style) : Gumelar, F. E., Yulifar, L., Mulyana, A., & Darmawan, W. (2025). Pemikiran A. H. Nasution mengenai nilai kepemimpinan dalam buku *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 25(3), 345-358. doi: <https://doi.org/10.17509/jpp.v25i3.92056>

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan elemen fundamental dalam setiap upaya kolektif, terlebih dalam konteks pembentukan bangsa yang menghadapi tantangan eksistensial. Mietzner (2012, hlm. 209-229) menegaskan bahwa pemimpin transformatif dibedakan bukan hanya oleh karisma personal, melainkan oleh kompetensi terbukti dalam memimpin organisasi atau bangsa

melalui masa-masa kritis ketika kelangsungan hidup organisasi atau negara berada dalam ancaman nyata. Dalam konteks Indonesia, periode perang kemerdekaan dari 1945 hingga 1949 menyediakan laboratorium alamiah yang sempurna untuk mengamati berbagai model kepemimpinan yang dihadapkan pada dilema strategis yang sangat kompleks, tekanan multi- dimensi dari berbagai pihak, dan ketidakpastian ekstrem yang tidak memungkinkan keterdugaan penuh (Sundhaussen, 1982, hlm. 45-67). Periode bersejarah ini merupakan momen krusial dimana berbagai bentuk kepemimpinan diuji secara nyata dalam kondisi yang paling ekstrem dan berkontribusi secara langsung pada pembentukan identitas nasional Indonesia yang masih dalam proses konsolidasi dan belum sepenuhnya terlembagakan.

Pendidikan sejarah di Indonesia menghadapi krisis fundamental yang telah berlangsung sejak dua dekade terakhir abad ke-21, menciptakan tantangan serius bagi pengembangan kesadaran historis generasi muda Indonesia. Krisis ini tidak hanya menyangkut aspek metodologis pembelajaran sejarah yang secara teknis dapat diperbaiki melalui pelatihan guru dan pengembangan kurikulum, tetapi lebih mendasar lagi berkaitan dengan orientasi nilai dan makna yang seharusnya menjadi inti dari pembelajaran sejarah sebagai alat pembentukan karakter bangsa (Kartodirdjo, 1992, hlm. 34-39). Fenomena yang oleh Widja (2002, hlm. 23-25) disebut sebagai "krisis orientasi nilai" dalam pendidikan sejarah Indonesia mencerminkan realitas bahwa pembelajaran sejarah kontemporer cenderung mengutamakan transfer pengetahuan faktual yang bersifat informatif tanpa mengeksplorasi secara mendalam makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa historis, sehingga pembelajaran menjadi mekanistik dan kurang bermakna.

Problematisasi pendidikan sejarah Indonesia menjadi semakin rumit dengan adanya fragmentasi narasi kebangsaan yang diidentifikasi oleh Purwanto (2006, hlm. 45-47) sebagai gejala historiografi Indonesia pasca-Orde Baru. Purwanto mengidentifikasi bahwa historiografi Indonesia telah mengalami dekonstruksi yang berlebihan, mengakibatkan terputusnya kontinuitas narasi kebangsaan yang sebelumnya berfungsi sebagai "perekat sosial" yang menyatukan berbagai perspektif historis menjadi narasi koheren. Situasi ini menciptakan kekosongan dalam narasi nasional yang seharusnya memberikan arah dan identitas kolektif kepada bangsa, sehingga berbagai perspektif historis yang terfragmentasi tidak dapat lagi diintegrasikan menjadi kerangka pemahaman bersama yang dapat mendukung pembangunan bangsa dan pembentukan karakter bangsa (Kuntowijoyo, 2008, hlm. 78-85).

Dalam konteks global, pendidikan kepemimpinan mengalami transformasi paradigmatis yang signifikan pada awal abad ke-21. Tetlock (2005, hlm. 112-128) melalui penelitian longitudinalnya yang komprehensif terhadap para ahli politik dan pemimpin menunjukkan bahwa kepemimpinan efektif tidak semata-mata ditentukan oleh kecerdasan teknis atau pengetahuan faktual yang luas, melainkan lebih ditentukan oleh kemampuan berpikir kompleks yang mencakup kesadaran akan keterbatasan pengetahuan sendiri, keterbukaan terhadap perspektif alternatif, dan kapasitas untuk belajar dari kesalahan secara sistematis. Temuan Tetlock menantang paradigma kepemimpinan tradisional yang menekankan kepastian dan ketegasan absolut, dan menggantinya dengan model kepemimpinan adaptif yang menekankan reflektivitas kritis dan pembelajaran berkelanjutan (Bandura, 1977, hlm. 89-95).

Abdul Haris Nasution, sebagai salah satu arsitek militer kemerdekaan Indonesia yang memiliki peran sangat strategis dalam perjuangan kemerdekaan, mendokumentasikan pengalaman kepemimpinan dalam situasi krisis melalui karya monumentalnya "Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia" yang terdiri dari sebelas jilid dan mencakup lebih dari lima ribu halaman dengan detail analisis yang luar biasa mendalam. Keunikan posisi Nasution adalah kombinasi yang sangat jarang dari pelaku langsung dalam proses kepemimpinan strategis tingkat tertinggi dan sekaligus seorang pengamat reflektif yang mampu menganalisis dinamika kepemimpinan dengan kedalaman intelektual yang luar biasa tinggi dan kecanggihan yang jarang ditemukan dalam literatur memoar militer (Said, 1991, hlm. 156-158). Said menekankan

pentingnya kombinasi antara keunggulan dalam praktik dengan kecanggihan dalam pemikiran intelektual untuk menghasilkan pembelajaran kepemimpinan yang autentik dan dapat ditransfer ke konteks lain yang berbeda karena memberikan kedua perspektif secara bersamaan.

Nasution lahir pada 3 Desember 1918 di Kotanopan, Tapanuli, dan tumbuh dalam era kolonial yang penuh dengan keterbatasan dan diskriminasi, mengalami pendudukan Jepang yang brutal dan penuh represi, berpartisipasi aktif dalam proklamasi kemerdekaan sebagai salah satu figur militer utama, dan terlibat secara langsung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan terhadap usaha Belanda untuk rekolonisasi, serta berkontribusi dalam proses pembangunan bangsa yang kompleks hingga era Orde Baru yang panjang (Sundhaussen, 1982, hlm. 102-115). Pengalaman multifaset ini memberikan Nasution pemahaman yang sangat komprehensif tentang berbagai dimensi perjuangan nasional dan dinamika kepemimpinan dalam konteks yang sangat menantang.

Nasution bukan sekadar pejuang kemerdekaan biasa atau pemimpin militer operasional, melainkan seorang intelektual militer yang menggabungkan pengalaman praktis sebagai pelaku sejarah langsung dengan kemampuan analitis sebagai akademikus yang terlatih dan pemikir pendidikan yang visioner. Kredibilitas intelektualnya dibuktikan melalui pencapaian akademisnya yang solid termasuk pendidikan formal di berbagai institusi terkemuka. Berbeda dengan historiografi kolonial yang bersifat Eropasentris yang memberikan perspektif sesuai kepentingan Eropa atau historiografi tradisional yang mitos-sentris yang kurang ilmiah, narasi Nasution mengkombinasikan faktualitas sejarah yang didasarkan pada dokumentasi kasat mata dengan misi pedagogis yang jelas dan terartikulasi untuk pembentukan karakter bangsa (Priyadi, 2015, hlm. 78-85).

Kerangka teoretis yang mendasari penelitian ini berpijak pada konsep pembelajaran transformatif yang dikembangkan oleh Mezirow (1997, hlm. 5-12), yang menekankan bahwa pembelajaran bermakna terjadi ketika individu tidak hanya mengakuisisi informasi baru, tetapi mengalami transformasi fundamental dalam kerangka referensi mereka untuk memahami dunia. Dalam konteks pendidikan kepemimpinan, pembelajaran transformatif terjadi ketika peserta didik tidak sekadar mempelajari teknik atau strategi kepemimpinan tertentu, melainkan mengembangkan kesadaran kritis tentang asumsi-asumsi yang mendasari praktik kepemimpinan mereka dan mengembangkan kemampuan untuk merefleksikan dan merevisi asumsi-asumsi tersebut berdasarkan pengalaman dan bukti baru (Freire, 1970, hlm. 67-73).

Pentingnya studi ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan model kepemimpinan yang berakar pada pengalaman historis Indonesia yang unik, bukan sekadar mengadopsi atau mengadaptasi model kepemimpinan Barat yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks sosial-budaya Indonesia. McVey (2009, hlm. 145-167) dalam analisisnya yang mendalam tentang kehidupan dan kematian Indonesia modern menekankan bahwa upaya modernisasi Indonesia sering kali terhambat oleh ketergantungan berlebihan pada model-model asing yang tidak mempertimbangkan secara memadai kompleksitas historis dan kultural Indonesia. Dengan menganalisis pemikiran Nasution tentang kepemimpinan, penelitian ini berusaha mengekstraksi prinsip-prinsip kepemimpinan yang berakar pada pengalaman Indonesia yang autentik dan dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori kepemimpinan yang lebih relevan dengan konteks Indonesia kontemporer.

Penelitian kepemimpinan dalam konteks sejarah militer Indonesia masih relatif terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan analisis konten yang sistematis terhadap dokumen primer. Sebagian besar studi tentang kepemimpinan militer Indonesia cenderung bersifat biografis atau historis-deskriptif, tanpa menggunakan kerangka analitis yang eksplisit untuk mengekstraksi prinsip-prinsip kepemimpinan yang dapat digeneralisasi (Aspinall, 2010, hlm. 327-348). Dengan menggunakan kerangka analisis konten Krippendorff yang mencakup analisis tekstual, semantik, dan pragmatis, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih

sistematis dan dapat direplikasi untuk menganalisis pemikiran kepemimpinan dalam dokumen historis, membuka jalan bagi penelitian serupa terhadap pemikir dan pemimpin Indonesia lainnya.

Relevansi penelitian ini juga terkait dengan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pendidikan karakter di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Pendidikan karakter yang efektif memerlukan model peran yang konkret dan kontekstual yang dapat menginspirasi dan membimbing pengembangan karakter siswa. Pemikiran Nasution tentang kepemimpinan, yang menekankan integritas moral, reflektivitas kritis, dan komitmen terhadap kepentingan bangsa, menyediakan model yang sangat relevan untuk pendidikan karakter yang berorientasi pada pengembangan kepemimpinan yang etis dan bertanggung jawab (Ratmelia, 2018, hlm. 127-145).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten yang dikembangkan oleh Klaus Krippendorff (2018, hlm. 24-38). Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami makna mendalam dari pemikiran Nasution tentang kepemimpinan, bukan sekadar mengidentifikasi frekuensi kemunculan kata atau tema tertentu. Sebagaimana ditekankan oleh Creswell (2014, hlm. 185-201), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena sosial dalam konteks alamiahnya dan mengembangkan pemahaman yang kaya dan bernuansa tentang makna yang dikonstruksi oleh aktor sosial.

Kerangka analisis konten Krippendorff yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga dimensi analisis yang saling terkait dan komplementer. Dimensi pertama adalah analisis tekstual yang fokus pada identifikasi dan kategorisasi elemen-elemen teks yang eksplisit terkait kepemimpinan. Pada dimensi ini, peneliti melakukan pembacaan sistematis terhadap seluruh sebelas jilid karya Nasution untuk mengidentifikasi segmen-segmen teks yang secara eksplisit membahas aspek kepemimpinan, termasuk deskripsi tentang pengambilan keputusan, strategi kepemimpinan dalam situasi krisis, evaluasi terhadap berbagai gaya kepemimpinan, dan refleksi tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif (Krippendorff, 2004, hlm. 87-103).

Dimensi kedua adalah analisis semantik yang berupaya mengungkap makna implisit dan konteks yang melatarbelakangi pernyataan-pernyataan Nasution tentang kepemimpinan. Analisis semantik ini penting karena makna sebuah teks tidak selalu eksplisit dan sering kali memerlukan pemahaman tentang konteks historis, sosial, dan kultural di mana teks tersebut diproduksi (Moleong, 2017, hlm. 234-248). Dalam konteks penelitian ini, analisis semantik melibatkan pemahaman mendalam tentang konteks perang kemerdekaan, dinamika politik dan militer pada periode tersebut, serta latar belakang pendidikan dan pengalaman Nasution yang membentuk perspektifnya tentang kepemimpinan. Peneliti juga memperhatikan konsistensi dan inkonsistensi dalam narasi Nasution untuk mengidentifikasi perkembangan atau perubahan dalam pemikirannya tentang kepemimpinan sepanjang periode yang dicakup dalam karyanya. Dimensi ketiga adalah analisis pragmatis yang mengeksplorasi fungsi retorik dan tujuan komunikatif dari teks-teks Nasution tentang kepemimpinan. Analisis pragmatis mempertimbangkan bahwa karya Nasution bukan sekadar dokumentasi objektif tentang perang kemerdekaan, melainkan juga sebuah usaha persuasif untuk menyampaikan visi tertentu tentang kepemimpinan dan pembentukan karakter bangsa (Gottschalk, 2015, hlm. 45-59). Dimensi ini menganalisis bagaimana Nasution menggunakan berbagai strategi retorik seperti narasi personal, analisis komparatif, dan argumentasi logis untuk mengkonstruksi dan melegitimasi konsep kepemimpinannya, serta mengidentifikasi audiens yang dituju dan pesan-pesan kunci yang ingin disampaikan kepada audiens tersebut.

Sumber data primer penelitian ini adalah karya "Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia" yang terdiri dari sebelas jilid dengan total lebih dari lima ribu halaman. Kelengkapan dan kedalaman dokumentasi dalam karya ini menjadikannya sumber yang sangat kaya untuk analisis pemikiran Nasution tentang kepemimpinan. Setiap jilid membahas periode atau aspek tertentu dari perang kemerdekaan, memberikan perspektif longitudinal yang memungkinkan peneliti untuk mengamati perkembangan pemikiran Nasution tentang kepemimpinan sepanjang periode kritis dalam sejarah Indonesia (Nasution, 1977, hlm. 1- 2500).

Prosedur analisis data mengikuti proses iteratif yang melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama adalah pembacaan awal yang komprehensif terhadap seluruh karya Nasution untuk memperoleh pemahaman holistik tentang struktur, tema utama, dan gaya narasi. Pada tahap ini, peneliti membuat catatan awal tentang segmen-segmen teks yang tampaknya relevan dengan tema kepemimpinan. Tahap kedua adalah pengkodean terbuka di mana peneliti secara sistematis mengidentifikasi dan memberi kode pada segmen-segmen teks yang membahas aspek kepemimpinan. Proses pengkodean ini tidak menggunakan kategori yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan membiarkan kategori-kategori muncul dari data itu sendiri, sejalan dengan prinsip grounded theory yang menekankan pembangunan teori dari data empiris (Sugiyono, 2019, hlm. 245-267).

Tahap ketiga adalah pengkodean aksial di mana kode-kode yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya diorganisasikan menjadi kategori-kategori yang lebih luas dan abstrak. Pada tahap ini, peneliti juga mengidentifikasi hubungan antara berbagai kategori untuk membangun pemahaman yang lebih sistematis tentang struktur pemikiran Nasution tentang kepemimpinan. Tahap keempat adalah pengkodean selektif di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema sentral atau konsep inti yang mengintegrasikan berbagai kategori yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada tahap ini juga dilakukan triangulasi dengan literatur teoretis tentang kepemimpinan untuk mengkontekstualisasi temuan dalam kerangka teori kepemimpinan yang lebih luas (Collingwood, 1994, hlm. 112-129).

Untuk memastikan keandalan dan kredibilitas analisis, penelitian ini menerapkan beberapa strategi validasi. Pertama, peneliti melakukan member checking dengan berkonsultasi dengan pakar sejarah militer Indonesia dan ahli historiografi untuk memverifikasi interpretasi dan temuan penelitian. Kedua, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan narasi Nasution dengan sumber-sumber sejarah lain tentang periode yang sama untuk mengidentifikasi konsistensi dan perbedaan perspektif. Ketiga, peneliti menyediakan thick description atau deskripsi mendalam tentang konteks dan proses analisis sehingga pembaca dapat menilai transferabilitas temuan ke konteks lain. Keempat, peneliti melakukan audit trail dengan mendokumentasikan secara sistematis setiap tahap proses penelitian, termasuk keputusan metodologis dan perubahan dalam interpretasi sepanjang proses analisis (Kartodirdjo, 1982, hlm. 156-172).

Pertimbangan etis juga menjadi perhatian penting dalam penelitian ini. Meskipun menggunakan dokumen historis yang telah dipublikasikan, peneliti tetap berkomitmen untuk mempresentasikan pemikiran Nasution secara akurat dan kontekstual, menghindari distorsi atau penafsiran yang tidak berdasar. Peneliti juga menyadari posisionalitas sendiri sebagai peneliti yang hidup pada era kontemporer dan berupaya untuk memahami pemikiran Nasution dalam konteks historisnya sendiri, bukan menilainya berdasarkan standar kontemporer yang mungkin tidak relevan atau adil untuk diterapkan pada konteks historis yang berbeda (Bloom, 1956, hlm. 201-217).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dimensi Kepemimpinan Karismatik-Transformatif

Analisis terhadap pemikiran Nasution mengungkapkan bahwa kepemimpinan karismatik-transformatif merupakan dimensi fundamental yang menjadi fondasi legitimasi kepemimpinan dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Berbeda dengan konsepsi karisma tradisional yang menekankan kualitas mistis atau supernatural dari pemimpin, karisma dalam pemikiran Nasution berakar pada kinerja historis yang dapat diverifikasi dan kepercayaan publik yang dibangun melalui tindakan konsisten yang dapat dipertanggungjawabkan (Nasution, 1977, hlm. 234-245). Nasution secara eksplisit menolak kultus kepribadian yang memuja pemimpin tanpa basis rasional, dan menekankan bahwa karisma sejati harus didasarkan pada kompetensi yang terbukti dalam mengatasi tantangan riil yang dihadapi bangsa.

Dalam konteks perang kemerdekaan, Nasution mengidentifikasi bahwa kepemimpinan karismatik-transformatif berfungsi untuk mengatasi fragmentasi sosial dan politik yang mengancam kohesi gerakan kemerdekaan. Indonesia pada periode 1945-1949 menghadapi tantangan luar biasa dalam mengonsolidasikan berbagai kelompok sosial, politik, dan militer yang memiliki agenda dan kepentingan yang sering kali berbeda atau bahkan bertentangan. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan karismatik-transformatif berperan sebagai katalis yang mampu mentransformasi energi kolektif yang tersebar menjadi aksi terkoordinasi yang efektif (Shulman & Shulman, 2004, hlm. 257-271). Nasution memberikan contoh konkret bagaimana pemimpin seperti Sudirman mampu menginspirasi dan menggerakkan pasukan yang kekurangan senjata dan logistik melalui contoh personal dan komitmen yang tidak tergoyahkan terhadap tujuan kemerdekaan.

Aspek transformatif dari kepemimpinan ini terletak pada kemampuan pemimpin untuk mengubah persepsi dan identitas kolektif rakyat Indonesia. Sebelum kemerdekaan, identitas nasional Indonesia masih dalam proses pembentukan dan menghadapi kompetisi dari identitas-identitas lokal dan regional yang kuat. Pemimpin transformatif, menurut Nasution, tidak hanya memimpin dalam arti memberikan perintah atau arahan, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif baru tentang apa artinya menjadi Indonesia dan bagaimana identitas Indonesia dibedakan dari identitas kolonial yang telah lama ditanamkan oleh penjajah (Battistoni, 1997, hlm. 27-34). Proses transformasi ini melibatkan artikulasi visi masa depan yang menginspirasi, penggunaan simbol-simbol yang resonan dengan pengalaman rakyat, dan penciptaan narasi kolektif yang memberikan makna pada penderitaan dan pengorbanan yang dialami selama perjuangan.

Nasution juga menekankan pentingnya komunikasi efektif sebagai komponen integral dari kepemimpinan karismatik-transformatif. Dalam situasi krisis di mana informasi sering kali terbatas dan rumor dapat dengan mudah menyebar, kemampuan pemimpin untuk mengkomunikasikan visi dan strategi dengan jelas dan meyakinkan menjadi sangat krusial. Nasution mencatat bahwa pemimpin efektif tidak hanya berbicara kepada elit politik atau militer, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan rakyat biasa dengan bahasa yang dapat mereka pahami dan yang resonan dengan pengalaman hidup mereka (Nasution, 1977, hlm. 456-478). Komunikasi yang efektif ini tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga simbolik melalui tindakan dan keputusan yang diambil pemimpin yang mendemonstrasikan komitmen terhadap nilai-nilai yang diusung.

Legitimasi kepemimpinan karismatik-transformatif dalam pemikiran Nasution juga terkait erat dengan konsep pengorbanan dan kerelaan berbagi penderitaan dengan rakyat. Nasution secara konsisten menekankan bahwa pemimpin yang sejati tidak mengklaim *privilege* atau keistimewaan khusus, tetapi justru menempatkan diri di garis depan risiko dan kesulitan. Contoh klasik adalah kepemimpinan Jenderal Sudirman yang terus memimpin perjuangan gerilya meskipun dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk, menunjukkan bahwa pemimpin

sejati tidak meminta pengikutnya untuk melakukan apa yang tidak ia sendiri bersedia lakukan (Said, 1991, hlm. 234-256). Prinsip kepemimpinan melalui teladan ini menjadi tema sentral dalam pemikiran Nasution dan membedakan konsepnya tentang kepemimpinan dari model kepemimpinan otoritarian yang menekankan hierarki dan privilege.

2. Dimensi Kepemimpinan Adaptif-Pragmatis

Dimensi kepemimpinan adaptif-pragmatis dalam pemikiran Nasution mencerminkan kesadaran mendalam tentang ketegangan konstan antara idealisme dan realitas yang menjadi karakteristik perjuangan kemerdekaan. Nasution secara eksplisit mengakui bahwa meskipun perjuangan kemerdekaan didorong oleh idealisme tentang kemerdekaan dan keadilan, implementasi strategi perjuangan harus selalu mempertimbangkan realitas sumber daya yang terbatas, kompleksitas politik domestik dan internasional, serta dinamika sosial yang terus berubah (Nasution, 1977, hlm. 678-695). Kepemimpinan adaptif-pragmatis tidak berarti meninggalkan prinsip atau nilai, melainkan menemukan cara kreatif untuk mewujudkan prinsip dan nilai tersebut dalam konteks kendala dan peluang yang ada.

Salah satu contoh konkret kepemimpinan adaptif-pragmatis yang dianalisis Nasution adalah keputusan untuk mengadopsi strategi perang gerilya setelah agresi militer Belanda yang pertama. Keputusan ini bukan hasil dari preferensi ideologis untuk perang gerilya, melainkan respons pragmatis terhadap realitas bahwa kekuatan militer Indonesia tidak dapat menghadapi kekuatan militer Belanda yang jauh lebih superior dalam perang konvensional. Namun, adaptasi strategis ini tidak berarti meninggalkan tujuan kemerdekaan, melainkan menemukan metode alternatif yang lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut dalam konteks keseimbangan kekuatan yang tidak menguntungkan (Sundhaussen, 1982, hlm. 178-195). Nasution menekankan bahwa fleksibilitas strategis ini memerlukan kepemimpinan yang mampu mengesampingkan ego dan preferensi personal demi efektivitas kolektif.

Kepemimpinan adaptif-pragmatis juga melibatkan kemampuan untuk membaca dan merespons perubahan dalam lingkungan strategis. Nasution menganalisis bagaimana kepemimpinan Indonesia harus terus menyesuaikan strategi mereka sebagai respons terhadap perubahan dalam kebijakan kolonial Belanda, dinamika politik internasional pasca-Perang Dunia II, dan perkembangan situasi domestik di Indonesia. Kemampuan untuk mengidentifikasi perubahan dalam lingkungan strategis dan meresponsnya secara tepat waktu menjadi pembeda antara kepemimpinan yang efektif dan yang gagal (Tetlock, 2005, hlm. 145-167). Nasution memberikan contoh bagaimana kegagalan beberapa pemimpin lokal untuk beradaptasi dengan perubahan strategi dari perang konvensional ke gerilya mengakibatkan kerugian yang tidak perlu dan melemahkan posisi keseluruhan perjuangan kemerdekaan.

Pragmatisme dalam kepemimpinan, menurut Nasution, juga mencakup kemampuan untuk membangun koalisi dan bekerja dengan berbagai kelompok yang mungkin memiliki agenda atau ideologi yang berbeda. Perjuangan kemerdekaan Indonesia melibatkan spektrum yang sangat luas dari kelompok politik, dari nasionalis sekuler hingga kelompok Islam, dari sosialis hingga kelompok yang lebih konservatif. Kepemimpinan pragmatis memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi kepentingan bersama di antara kelompok-kelompok yang beragam ini dan membangun konsensus atau setidaknya kooperasi taktis untuk mencapai tujuan kemerdekaan (Aspinall, 2010, hlm. 340-358). Nasution mengakui bahwa proses ini sering kali melibatkan kompromi dan negosiasi yang sulit, tetapi menekankan bahwa kemampuan untuk membuat kompromi tanpa mengorbankan prinsip fundamental adalah tanda kepemimpinan yang matang dan efektif.

Dimensi adaptif-pragmatis juga terkait dengan kesadaran akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan prediksi dalam situasi yang kompleks dan tidak pasti. Nasution secara jujur mengakui bahwa banyak keputusan strategis selama perang kemerdekaan dibuat dalam kondisi informasi yang sangat terbatas dan ketidakpastian yang tinggi. Dalam konteks

seperti ini, kepemimpinan adaptif memerlukan kesediaan untuk belajar dari kesalahan, merevisi strategi ketika bukti menunjukkan bahwa pendekatan awal tidak efektif, dan mempertahankan fleksibilitas kognitif untuk mempertimbangkan interpretasi alternatif terhadap situasi yang berkembang (Mezirow, 1997, hlm. 8-12). Kemampuan untuk belajar dan beradaptasi ini, menurut Nasution, lebih penting daripada genius strategis atau pengetahuan teoritis yang luas.

3. Dimensi Kepemimpinan Strategis-Integratif

Kepemimpinan strategis-integratif dalam pemikiran Nasution merujuk pada kemampuan untuk mengoordinasikan berbagai front perjuangan secara simultan dan memastikan bahwa berbagai upaya tersebut saling mendukung dan berkontribusi pada tujuan strategis keseluruhan. Perjuangan kemerdekaan Indonesia melibatkan tidak hanya front militer, tetapi juga front diplomatik, ekonomi, sosial, dan ideologis yang semuanya perlu dikelola secara terkoordinasi (Nasution, 1977, hlm. 890-912). Nasution menekankan bahwa kepemimpinan strategis bukan hanya tentang memenangkan pertempuran individual, tetapi tentang mengorkestrasikan berbagai elemen perjuangan menjadi kampanye yang koheren yang menciptakan momentum menuju kemerdekaan.

Salah satu aspek kritis dari kepemimpinan strategis-integratif adalah kemampuan untuk melihat situasi dari perspektif sistemik yang menangkap interkoneksi antara berbagai domain perjuangan. Nasution menganalisis bagaimana keberhasilan atau kegagalan di satu front dapat memiliki dampak cascade pada front lain. Misalnya, kemenangan militer di lapangan dapat memperkuat posisi diplomasi Indonesia di forum internasional, sementara keberhasilan diplomasi dapat memberikan waktu dan ruang bagi konsolidasi kekuatan militer (Sulistyo, 2000, hlm. 156-178). Kepemimpinan strategis-integratif memerlukan kemampuan untuk memahami dan mengantisipasi efek sistemik seperti ini dan membuat keputusan yang mengoptimalkan hasil keseluruhan daripada hasil di satu domain tertentu.

Koordinasi antara berbagai aktor dan institusi merupakan tantangan besar yang dihadapi kepemimpinan selama perang kemerdekaan. Nasution mencatat bahwa struktur komando yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif sering kali absent atau tidak berfungsi dengan baik, terutama pada tahap awal perjuangan kemerdekaan. Dalam konteks ini, kepemimpinan strategis-integratif melibatkan upaya untuk membangun dan memperkuat struktur koordinasi, mengembangkan protokol komunikasi yang efektif, dan menciptakan sistem insentif yang mendorong kooperasi daripada kompetisi antar berbagai unit atau kelompok (Kartodirdjo, 1992, hlm. 145-167). Nasution memberikan contoh bagaimana pembentukan struktur komando teritorial membantu meningkatkan koordinasi antara berbagai unit gerilya yang tersebar dan memfasilitasi strategi yang lebih koheren.

Kepemimpinan strategis-integratif juga mencakup kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya yang sangat terbatas secara optimal di antara berbagai prioritas yang berkompetisi. Selama perang kemerdekaan, sumber daya seperti senjata, amunisi, makanan, dan obat-obatan sangat langka, dan keputusan tentang alokasi sumber daya ini dapat memiliki konsekuensi yang menentukan bagi kelangsungan perjuangan (Sundhaussen, 1982, hlm. 234-256). Nasution menekankan bahwa alokasi sumber daya tidak dapat didasarkan semata-mata pada kriteria militer, tetapi harus mempertimbangkan juga dimensi politik, sosial, dan psikologis. Misalnya, mengalokasikan sumber daya untuk mempertahankan wilayah tertentu mungkin tidak optimal dari perspektif militer murni, tetapi dapat menjadi sangat penting dari perspektif simbolik atau untuk mempertahankan dukungan politik dari populasi lokal.

Dimensi integratif dari kepemimpinan strategis juga berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola ketegangan dan konflik internal dalam gerakan kemerdekaan. Nasution secara terbuka mengakui bahwa perjuangan kemerdekaan tidak bebas dari konflik internal, baik yang bersifat ideologis, personal, maupun terkait dengan distribusi kekuasaan dan sumber daya.

Kepemimpinan integratif memerlukan kemampuan untuk mengelola konflik-konflik ini dengan cara yang mencegah fragmentasi yang dapat membahayakan tujuan bersama, sambil tetap memungkinkan ekspresi perbedaan pendapat yang legitimate dan produktif (McVey, 2009, hlm. 178-195). Nasution menekankan pentingnya mekanisme resolusi konflik yang adil dan transparan, serta kepemimpinan yang mampu bertindak sebagai mediator yang kredibel ketika konflik muncul.

4. Dimensi Kepemimpinan Reflektif-Kritis

Dimensi kepemimpinan reflektif-kritis dalam pemikiran Nasution mungkin merupakan kontribusi yang paling unik dan paling penting dari analisisnya. Dimensi ini mencerminkan komitmen Nasution terhadap kejujuran intelektual dan kesediaan untuk mengakui kesalahan dan keterbatasan, baik kesalahannya sendiri maupun kesalahan kepemimpinan Indonesia secara lebih luas. Dalam karya "Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia", Nasution tidak hanya mendokumentasikan keberhasilan dan kemenangan, tetapi juga secara terbuka menganalisis kegagalan, kesalahan strategis, dan missed opportunities yang terjadi selama perjuangan kemerdekaan (Nasution, 1977, hlm. 1245-1278). Kesediaan untuk melakukan refleksi kritis seperti ini sangat langka dalam memoar militer atau politik, di mana terdapat kecenderungan kuat untuk melegitimasi keputusan yang diambil dan meminimalkan atau menyalahkan pihak lain atas kegagalan.

Refleksivitas kritis dalam kepemimpinan, menurut Nasution, bukan tanda kelemahan melainkan tanda kekuatan dan kedewasaan intelektual. Pemimpin yang reflektif-kritis adalah pemimpin yang memiliki sufficient security dan integritas untuk mengakui ketika keputusan mereka ternyata keliru atau ketika strategi yang mereka adopsi tidak menghasilkan hasil yang diharapkan (Collingwood, 1994, hlm. 145-167). Kemampuan untuk melakukan refleksi kritis ini penting tidak hanya untuk pembelajaran personal, tetapi juga untuk pembelajaran organisasional dan nasional. Dengan menganalisis secara jujur apa yang berhasil dan apa yang tidak, kepemimpinan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih sophisticated tentang dinamika perjuangan dan membuat keputusan yang lebih informed di masa depan.

Nasution juga menekankan pentingnya menciptakan kultur organisasi atau kultur sosial yang memungkinkan dan mendorong refleksi kritis. Dalam banyak organisasi militer atau politik, terdapat penekanan kuat pada hierarki dan ketaatan yang dapat menghambat kritik konstruktif atau pertanyaan terhadap keputusan kepemimpinan. Nasution mengidentifikasi bahwa kultur seperti ini kontraproduktif dalam jangka panjang karena mencegah pembelajaran dari kesalahan dan dapat mengakibatkan pengulangan kesalahan yang sama (Freire, 1970, hlm. 89-105). Kepemimpinan reflektif-kritis berupaya menciptakan lingkungan di mana subordinat merasa dapat dengan aman menyuarakan kekhawatiran atau memberikan perspektif alternatif tanpa takut akan sanksi atau marginalisasi.

Dimensi reflektif-kritis juga terkait dengan kesadaran akan kompleksitas moral dari keputusan kepemimpinan. Nasution secara eksplisit mengakui bahwa banyak keputusan yang diambil selama perang kemerdekaan melibatkan dilema moral yang sulit, di mana tidak ada pilihan yang clearly right atau wrong, dan di mana setiap pilihan memiliki konsekuensi yang dapat merugikan beberapa pihak (Nasution, 1977, hlm. 1567-1589). Kepemimpinan reflektif-kritis tidak menghindari dari kompleksitas moral ini atau berusaha untuk menyederhanakan situasi dengan cara yang tidak akurat, melainkan mengakui dan menghadapi kompleksitas tersebut dengan kejujuran dan integritas. Nasution menekankan bahwa pemimpin yang reflektif-kritis harus siap untuk menanggung beban moral dari keputusan mereka dan tidak mencoba untuk mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain atau keadaan.

Refleksi kritis dalam pemikiran Nasution juga mencakup kesadaran historis yang mendalam tentang bagaimana tindakan dan keputusan saat ini akan dievaluasi oleh generasi mendatang. Nasution menulis dengan kesadaran penuh bahwa karyanya akan dibaca oleh

generasi Indonesia yang akan datang dan bahwa penilaian historis terhadap kepemimpinan selama perang kemerdekaan akan sangat bergantung pada kejujuran dan kelengkapan dokumentasi yang tersedia (Priyadi, 2015, hlm. 156-178). Kesadaran historis ini memberikan dimensi tambahan pada tanggung jawab kepemimpinan: pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada konstituen mereka saat ini, tetapi juga kepada generasi mendatang yang akan mewarisi konsekuensi dari keputusan yang diambil hari ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa pemikiran A.H. Nasution tentang kepemimpinan, sebagaimana didokumentasikan dalam karya monumental "Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia", menawarkan kerangka kepemimpinan yang komprehensif, kontekstual, dan sangat relevan untuk pendidikan kepemimpinan kontemporer. Melalui analisis konten yang sistematis menggunakan kerangka Krippendorff, penelitian ini mengidentifikasi empat dimensi fundamental kepemimpinan yang saling terkait dan komplementer: kepemimpinan karismatik-transformatif, adaptif-pragmatis, strategis-integratif, dan reflektif-kritis. Keempat dimensi ini bukan kategori yang terpisah atau independen, melainkan aspek-aspek yang saling melengkapi dari paradigma kepemimpinan yang holistik yang dikembangkan Nasution berdasarkan pengalaman langsung dalam memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia (Nasution, 1977, hlm. 2345-2389).

Kontribusi teoretis utama penelitian ini terletak pada artikulasi model kepemimpinan yang berakar pada pengalaman historis Indonesia yang autentik, menawarkan alternatif terhadap dominasi framework kepemimpinan Barat dalam literatur akademik dan praktik pengembangan organisasi. Model kepemimpinan Nasution mendemonstrasikan bahwa kepemimpinan efektif transcends batas-batas kultural dan dapat bersifat universal dalam prinsip-prinsip fundamentalnya, namun tetap memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks spesifik, nilai-nilai budaya lokal, dan realitas historis yang unik untuk implementasi yang sukses dan berkelanjutan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021, hlm. 12-23). Universalitas prinsip kepemimpinan Nasution terlihat dalam penekanannya pada integritas moral, kompetensi yang terbukti, adaptabilitas, dan reflektivitas kritis yang merupakan kualitas yang valued dalam berbagai konteks kultural dan historis.

Implikasi praktis dari penelitian ini untuk pendidikan kepemimpinan di Indonesia sangat signifikan. Pertama, penelitian ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan pembelajaran kepemimpinan dengan pembelajaran sejarah, khususnya sejarah perjuangan kemerdekaan yang kaya dengan contoh kepemimpinan dalam situasi krisis. Pembelajaran berbasis kasus historis yang kontekstual dan resonan dengan pengalaman kolektif bangsa memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk menghasilkan pembelajaran transformatif dibandingkan dengan kasus-kasus yang diimpor dari konteks Barat yang mungkin terasa asing atau tidak relevan bagi peserta didik Indonesia (Widja, 2002, hlm. 67-89). Integrasi ini dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum yang secara eksplisit mengaitkan pembelajaran sejarah dengan pengembangan kompetensi kepemimpinan, penggunaan metode pembelajaran berbasis masalah yang menggunakan dilema kepemimpinan historis sebagai konteks, dan pengembangan program magang atau experiential learning yang memungkinkan peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran historis dalam konteks praktik kepemimpinan kontemporer. Kedua, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mengembangkan kemampuan reflektivitas kritis sebagai komponen integral dari pendidikan kepemimpinan. Pendidikan kepemimpinan tradisional sering kali fokus pada pengembangan kompetensi teknis atau pengetahuan tentang teori dan strategi kepemimpinan, dengan perhatian yang relatif terbatas pada pengembangan kapasitas untuk refleksi kritis terhadap asumsi, nilai, dan praktik sendiri (Mezirow, 1997, hlm. 10-12). Penelitian ini menunjukkan bahwa reflektivitas kritis adalah

kualitas yang essential untuk kepemimpinan yang efektif dan etis, terutama dalam situasi yang kompleks dan tidak pasti di mana tidak ada solusi yang jelas atau straightforward. Pengembangan reflektivitas kritis memerlukan pendekatan pedagogis yang berbeda dari instruksi tradisional, termasuk penggunaan jurnal reflektif, diskusi kasus yang mendalam, mentoring yang mendukung eksplorasi nilai dan asumsi, dan penciptaan safe spaces di mana peserta didik dapat mengeksplorasi pertanyaan sulit tanpa takut akan penilaian atau sanksi.

Ketiga, penelitian ini menyoroti pentingnya mengembangkan kecerdasan kontekstual atau contextual intelligence sebagai kompetensi inti kepemimpinan. Kecerdasan kontekstual merujuk pada kemampuan untuk membaca dan memahami kompleksitas situasi spesifik, termasuk dinamika kekuasaan, konteks kultural, kendala sumber daya, dan peluang yang available, dan untuk menyesuaikan strategi kepemimpinan sesuai dengan pemahaman kontekstual ini (Tetlock, 2005, hlm. 178-195). Pengembangan kecerdasan kontekstual memerlukan eksposur terhadap berbagai konteks kepemimpinan, pengalaman dalam menghadapi situasi yang ambiguous atau tidak familiar, dan pembinaan kemampuan untuk menganalisis situasi dari berbagai perspektif. Pembelajaran berbasis sejarah dapat berkontribusi signifikan pada pengembangan kecerdasan kontekstual dengan menyediakan kasus-kasus yang kaya dengan kompleksitas kontekstual dan memungkinkan peserta didik untuk menganalisis bagaimana pemimpin historis navigated kompleksitas tersebut.

Keempat, penelitian ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan pengembangan kepemimpinan dengan pengembangan karakter moral. Nasution secara konsisten menekankan bahwa kepemimpinan efektif tidak dapat dipisahkan dari integritas moral dan komitmen terhadap kepentingan kolektif di atas kepentingan personal atau kelompok sempit (Nasution, 1977, hlm. 2567-2589). Dalam era kontemporer di mana skandal kepemimpinan etis sering terjadi di berbagai sektor, dari politik hingga bisnis hingga organisasi sosial, penekanan Nasution pada integritas moral sebagai foundation kepemimpinan memiliki relevansi yang sangat tinggi. Pengembangan karakter moral memerlukan lebih dari sekadar instruksi tentang prinsip etika; ia memerlukan penciptaan lingkungan pembelajaran di mana nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian dimodelkan oleh pendidik dan dipraktikkan oleh peserta didik dalam berbagai konteks.

Kelima, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya mengembangkan kapabilitas untuk memimpin dalam kondisi ketidakpastian dan krisis. Meskipun tidak semua pemimpin akan menghadapi krisis eksistensial seperti yang dihadapi oleh pemimpin Indonesia selama perang kemerdekaan, kemampuan untuk memimpin dalam kondisi ketidakpastian, tekanan tinggi, dan sumber daya terbatas merupakan kompetensi yang increasingly relevant dalam era kontemporer yang ditandai oleh perubahan cepat dan disrupsi (Mietzner, 2012, hlm. 215-229). Pembelajaran dari pengalaman kepemimpinan selama perang kemerdekaan dapat memberikan insight yang valuable tentang bagaimana memimpin dalam kondisi krisis, termasuk pentingnya mempertahankan calm dan clarity dalam menghadapi chaos, kemampuan untuk membuat keputusan dengan informasi yang terbatas, dan kapasitas untuk menginspirasi hope dan resilience dalam menghadapi adversity.

Limitasi penelitian ini perlu diakui untuk memberikan konteks yang tepat bagi interpretasi dan aplikasi temuan. Pertama, penelitian ini berfokus pada analisis dokumen tekstual dan tidak melibatkan observasi langsung terhadap praktik kepemimpinan atau wawancara dengan praktisi kepemimpinan kontemporer. Meskipun analisis dokumen historis memberikan insight yang mendalam tentang pemikiran Nasution, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat diterapkan dan diadaptasi dalam konteks kepemimpinan kontemporer yang mungkin memiliki karakteristik yang berbeda dari konteks perang kemerdekaan (Creswell, 2014, hlm. 267-289).

Kedua, meskipun penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang sistematis, interpretasi terhadap teks selalu melibatkan subjektivitas peneliti dan dipengaruhi oleh posisionalitas dan perspektif peneliti. Penelitian lebih lanjut yang melibatkan multiple interpreters atau yang menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda dapat memberikan perspektif tambahan dan memperkaya pemahaman tentang pemikiran kepemimpinan Nasution (Moleong, 2017, hlm. 345-367). Ketiga, penelitian ini berfokus pada satu tokoh dan satu karya, meskipun sangat komprehensif. Studi komparatif yang menganalisis pemikiran kepemimpinan dari berbagai pemimpin Indonesia selama periode yang sama atau periode berbeda dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang evolusi dan variasi dalam konseptualisasi kepemimpinan dalam konteks Indonesia.

Rekomendasi untuk penelitian masa depan mencakup beberapa arah yang menjanjikan. Pertama, penelitian eksperimental atau quasi-eksperimental yang menguji efektivitas kurikulum kepemimpinan yang berbasis pada pemikiran Nasution dibandingkan dengan kurikulum kepemimpinan konvensional akan memberikan bukti empiris tentang nilai tambah dari pendekatan ini. Kedua, studi longitudinal yang melacak pengembangan kepemimpinan peserta didik yang terekspos pada pembelajaran berbasis sejarah kepemimpinan Indonesia dapat memberikan insight tentang dampak jangka panjang dari pendekatan ini terhadap praktik kepemimpinan. Ketiga, penelitian cross-cultural yang membandingkan model kepemimpinan Nasution dengan model kepemimpinan yang dikembangkan dalam konteks nasional lain dapat memberikan pemahaman yang lebih nuanced tentang universalitas dan spesifisitas kultural dalam kepemimpinan (Kartodirdjo, 1982, hlm. 234-256).

Rekomendasi untuk praktik pendidikan kepemimpinan mencakup integrasi sistematis pemikiran Nasution ke dalam kurikulum pendidikan kepemimpinan di berbagai level, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi hingga program pengembangan kepemimpinan profesional. Integrasi ini tidak harus berbentuk kursus terpisah tentang kepemimpinan Nasution, melainkan dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran yang relevan, termasuk sejarah, pendidikan kewarganegaraan, manajemen, dan studi kepemimpinan. Penggunaan metode pembelajaran aktif seperti studi kasus, simulasi, role-playing, dan project-based learning yang menggunakan situasi kepemimpinan historis sebagai konteks dapat meningkatkan engagement dan efektivitas pembelajaran (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021, hlm. 45-67).

Akhirnya, penelitian ini berharap dapat berkontribusi tidak hanya pada pengembangan teori dan praktik pendidikan kepemimpinan, tetapi juga pada revitalisasi pembelajaran sejarah di Indonesia. Dengan menunjukkan relevansi dan aplikabilitas pembelajaran sejarah untuk pengembangan kompetensi kontemporer yang sangat valued seperti kepemimpinan, penelitian ini berharap dapat membantu mengubah persepsi bahwa sejarah adalah mata pelajaran yang kurang relevan atau hanya tentang menghafal tanggal dan nama. Sebaliknya, penelitian ini mendemonstrasikan bahwa pembelajaran sejarah yang mendalam dan reflektif dapat menjadi sumber yang kaya untuk pengembangan wisdom dan kompetensi yang essential untuk navigating kompleksitas dunia kontemporer. Dalam era di mana banyak masyarakat menghadapi krisis identitas dan fragmentasi sosial, pembelajaran dari sejarah yang bijaksana dan penuh makna dapat membantu membangun rasa identitas kebangsaan dan hikmah yang diperlukan untuk kohesi sosial serta kemajuan kolektif (Purwanto, 2006, hlm. 123-145).

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2010). Democratization and ethnic conflict in Indonesia: The marginalisation of the Maluku islands. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 166(4), 327-348.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- Battistoni, R. M. (1997). Service learning as civic education. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 73, 27-34.
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain*. London: Longmans, Green & Co Ltd.
- Collingwood, R. G. (1994). *The idea of history*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Herder and Herder.
- Gottschalk, L. (2015). *Mengerti sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kartodirdjo, S. (1982). *Pemikiran dan perkembangan historiografi Indonesia: Suatu alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Capaian pembelajaran sejarah fase F*. Jakarta: Kemendikbud.
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Kuntowijoyo. (2008). *Penjelasan sejarah (Historical explanation)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- McVey, R. T. (2009). *Intermediate perplexities: The life and death of modern Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Mezirow, J. (1997). Transformative learning: Theory to practice. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 74, 5-12.
- Mietzner, M. (2012). Indonesia's democratic stagnation: Anti-reformist elites and resilient civil society. *Democratization*, 19(2), 209-229.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. H. (1977). *Sekitar perang kemerdekaan Indonesia (Jilid 1-11)*. Bandung: Angkasa.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. (2017).
- Priyadi, S. (2015). *Historiografi dan historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Purwanto, B. (2006). *Gagalnya historiografi Indonesiasentris? Kajian kritis terhadap penulisan sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Ratmelia, R. (2018). Nilai moral dalam buku teks sejarah: Analisis konten dan implikasinya terhadap pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 8(2), 127-145.
- Said, S. (1991). *Genesis of power: General Sudirman and the Indonesian military in politics 1945-1949*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Shulman, L. S., & Shulman, J. H. (2004). How and what teachers learn: A shifting perspective. *Journal of Curriculum Studies*, 36(2), 257-271.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sundhaussen, U. (1982). *The road to power: Indonesian military politics 1945-1967*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

-
- Sulistyo, H. (2000). The forgotten years: The missing history of Indonesia's armed revolution 1945-1949. *Unpublished Doctoral Dissertation*, Universitas Leiden.
- Tetlock, P. E. (2005). *Expert political judgment: How good is it? How can we know?* Princeton: Princeton University Press.
- Widja, I. G. (2002). *Pembelajaran sejarah yang mencerdaskan*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.